



**PENGARUH OPINI AUDIT BPK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DAN INTERGOVERNMENTAL REVENUE TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DI JAWA TIMUR
TAHUN 2017-2019**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh

Andre Bayu Pratama
NPM. 21801082024

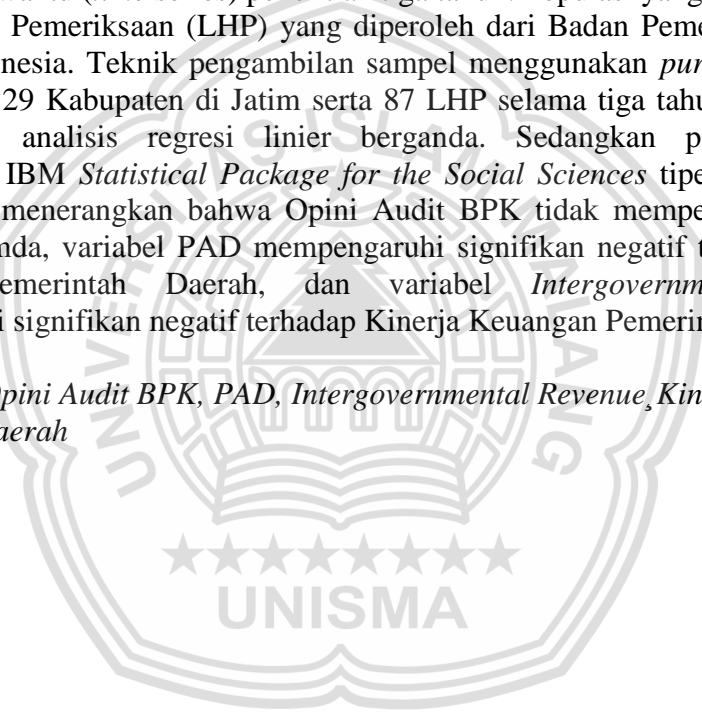


**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MALANG
2022**

ABSTRAK

Kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu tolak ukur capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang berasal dari wilayahnya ataupun pemerintah pusat. Pengelolaan secara mandiri berguna untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh Opini Audit BPK, PAD, dan *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019 baik secara simultan dan secara parsial. Metode penelitian menggunakan metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder dengan kurun waktu (*time series*) penelitian tiga tahun. Populasi yang digunakan yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh 29 Kabupaten di Jatim serta 87 LHP selama tiga tahun. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Sedangkan pengolahan data menggunakan IBM *Statistical Package for the Social Sciences* tipe 22. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa Opini Audit BPK tidak mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemda, variabel PAD mempengaruhi signifikan negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan variabel *Intergovernmental Revenue* mempengaruhi signifikan negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: *Opini Audit BPK, PAD, Intergovernmental Revenue, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*



ABSTRACT

The financial performance of local governments is a measure of the success of local governments in managing resources originating from their regions or the central government. Management independently and jointly provide excellent service to society. The purpose of this study is to find out the effect of the Audit Opinion of BPK, Local Revenue (PAD) and Intergovernmental Revenue on the Financial Performance of Regency Governments in East Java in 2017-2019, either simultaneously or partially. The research used the associative method with a quantitative approach. The data used secondary data with a time series of three years. The population used the Audit Result Report (LHP) obtained from the Audit Board of Indonesia. The sampling technique used purposive sampling and obtained 29 districts in East Java and 87 LHP for three years. Data analysis used multiple linear regression analysis. Meanwhile, the data processing used IBM Statistical Package for the Social Sciences type 22. The results of this study explain that the Audit Opinion of BPK has no effect on the Financial Performance of Regency Governments. The PAD variable has a significant negative effect on the Financial Performance of Regency Governments and the Intergovernmental Income variable has a significant negative effect on the the Financial Performance of Regency Governments.

Keyword: Audit Opinion BPK, Local Revenue, Intergovernmental Revenue, Financial Performance of Local Government

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1998 Indonesia telah terjadi krisis moneter, politik dan ekonomi yang mengakibatkan sistem pemerintahan berubah. Perubahan yang dilakukan yaitu adanya otonomi daerah yang disahkan dan menjadi amanah dari UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian diperbarui dengan UU No 32 Tahun 2004. Adanya peraturan tersebut pemerintah pusat mulai melakukan pengalihan tanggung jawab, kewenangan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya ke pemerintah daerah yang dikenal dengan *big bang decentralization* atau program besar desentralisasi (Akhmad, 2019:9).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menerangkan pemerintah daerah harus dapat mandiri dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga adanya otonomi daerah partisipasi masyarakat dapat tersalurkan dan terwujud serta pemerintahan daerah lebih unggul dan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain sistem pemerintahan, pemerintah telah melakukan perubahan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi UU No. 33 Tahun 2004.

Peran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam menilai tata kelola keuangan pemerintah daerah sangat diperlukan supaya tidak

terjadi pelanggaran hukum (Korupsi) dan menjadi persoalan di Indonesia, maka diperlukan perbaikan serta terdapat upaya optimalisasi penggunaan keuangan daerah yang berguna program-program yang direncanakan dan digunakan sebagai kemakmuran rakyat. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2016 menjelaskan bahwa akibat tidak mengikuti peraturan perundang-undangan telah terjadi kerugian *financial* (keuangan) sebesar Rp2,086 kuadrilliun dengan jumlah permasalahan sebanyak 4.234 kasus dari 542 pemerintah daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga pemeriksa keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemeriksaan BPK RI bertujuan untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik. Untuk meyakinkan akuntabilitas publik maka dibutuhkan dua akuntabilitas yaitu akuntabilitas keuangan serta akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas keuangan pemerintah daerah diukur dengan memperoleh pernyataan opini audit BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah BPK melakukan pemeriksaan laporan keuangan daerah. Pemberian opini tersebut seharusnya diiringi pencapaian kinerja pengelolaan keuangan yang baik. Pencapaian kinerja yang baik pemerintah daerah tidak melakukan penyelewengan dana (korupsi) dan ditunjukkan dengan taraf hidup masyarakat yang baik.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah menjelaskan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparansi, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan seperti keadilan dan kepatuhan. Pengelolaan keuangan daerah dikatakan baik apabila Laporan Realisasi Anggaran tidak terjadi selisih (defisit/surplus) terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Terjadinya defisit atau surplus tidak berarti pemerintah daerah bukan menjadi kunci utama, karena kinerja pemerintah dapat dipengaruhi berbagai faktor diantaranya kondisi mikro makro ekonomi, pembiayaan daerah, belanja daerah dan penerimaan daerah baik dari daerahnya sendiri atau penerimaan dari pusat. Tujuan dari pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya terhadap publik dan dapat menyejahterakan masyarakat.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan *output* dari BPK setelah melakukan pemeriksaan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terdiri atas pemeriksaan kinerja, pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Setelah melakukan pemeriksaan, BPK akan mengungkapkan opini audit, temuan audit dan rekomendasi dalam LHP. Opini Audit BPK diantaranya Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar serta Tidak Memberikan Pendapat. Wajar Tanpa Pengecualian merupakan pernyataan Opini Audit BPK yang terbaik, sedangkan Tidak Memberikan Pendapat merupakan pernyataan Opini Audit BPK yang sangat kurang baik.

Hasil pemeriksaan BPK dalam IHPS semester II tahun 2017 menerangkan terdapat 5 LKPD Tahun 2016 dari 542 pemerintah daerah (pemda) wajib

menyertakan LKPD tahun 2016. Hasil pemeriksaan BPK terhadap 5 pemda yang terlambat memberikan LKPD mengungkapkan 3 LKPD memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dan 2 LKPD memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Sehingga secara keseluruhan hasil pemeriksaan BPK pada semester II tahun 2016 dari 542 BPK memberikan opini WTP kepada 378 (70%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 141 (26%) LKPD, dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) sebanyak 23 (4%) LKPD.

Berdasarkan penjelasan tersebut masih ada LKPD yang memperoleh opini TMP. Dengan demikian pemerintah daerah memiliki kinerja yang kurang baik dan maksimal. Salah satu provinsi di Indonesia yaitu Jawa Timur terus berupaya menciptakan kinerja keuangan yang baik, hal ini ditandai diberikannya Opini Audit BPK selama tahun 2016-2020 berturut-turut dengan menyatakan Wajar Tanpa Pengecualian.

Pemberian Opini Audit WTP bukan menjadi tolak ukur pemerintah dalam mengindikasikan pemerinrah daerah terbebas dari korupsi. Seperti yang terjadi pada pemerintah daerah (pemda) Kabupaten Pemekasan di tahun 2017 yang memperoleh Opini WTP. Kepala daerah menggunakan kewenangannya untuk memakai anggaran transfer daerah ke desa sebagai dana untuk memberhentikan kasus proyek infrasturktur di Desa Dasok sebesar Rp160.000.000 (kompas.com).

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang terdiri dari hasil retribusi daerah, pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Hapsari dan Lestari (2020)

menerangkan bahwa tujuan adanya PAD dapat memberikan kontribusi penerimaan daerah yang berguna untuk menunjang pembangunan serta perbaikan infrastruktur secara mandiri. Apabila PAD semakin meningkat pemerintah daerah memiliki jumlah kas yang cukup, sehingga dapat digunakan untuk membiayai program-program pemerintah yang telah direncanakan dan terciptanya kinerja keuangan yang baik.

Dana perimbangan (*Intergovernmental revenue*) dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan ialah dana yang diperoleh dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang terdiri dari DAK (Dana Alokasi Khusus), DBH (Dana Bagi Hasil), dan DAU (Dana Alokasi Umum). Andirfa, *et al* (2016) Adanya *intergovernmental revenue* diharapkan dapat membantu mendanai program-program pemerintah daerah serta mengurangi terjadinya ketimpangan pendanaan pemerintah dari pusat ke daerah. Apabila jumlah dana perimbangan yang diterima semakin besar dari pemerintah pusat, hal tersebut dapat memperlihatkan seberapa bergantungnya pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan menyebabkan kinerja pemerintah daerah menjadi menurun.

Hasil-hasil penelitian sebelumnya terdapat ketidakkonsistenan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Penelitian tentang Opini Audit yang dilakukan Sisdyani dan Suryaningsih (2016) menyatakan bahwa Opini Audit berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan

penelitian yang dilakukan Mappiasse (2018) tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh Andirfa, *et al* (2016) menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Mappiasse (2018) bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian yang berbeda dilakukan Wibowo dan Mulyani (2017) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Indrawati, *et al* (2020) Kekayaan Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andirfa, *et al* (2016) *Intergovernmental Revenue* berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil yang sama dikemukakan oleh Sisdyani dan Suryaningsih (2016) bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Menurut Mappiasse (2018) Dana Perimbangan sangat berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Rahayu dan Dwitama (2020) menerangkan bahwa *Intergovernmental Revenue* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Terdapat perbedaan beberapa hal antara peneliti satu dengan yang lainnya. Pada penelitian sebelumnya lebih sering menggunakan variabel *Intergovernmental Revenue* (dana perimbangan) dan Pendapatan Asli Daerah.

Terdapat perbedaan waktu penelitian dan tempat penelitian yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga pada penelitian ini ditambahkan Opini Audit BPK dikarenakan jarang digunakan oleh peneliti sebelumnya. Selain itu Provinsi Jawa Timur memperoleh Opini WTP selama 5 tahun secara berturut-turut. Diberikannya Opini WTP, pengelolaan keuangan pemerintah daerah bebas dari kecurangan serta wajar dan material (jatim.bpk.go.id).

Provinsi Jawa Timur terdiri atas wilayah-wilayah kecil diantaranya pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menjelaskan bahwa pemerintah kota memiliki luas wilayah yang lebih kecil, kepadatan penduduk yang lebih tinggi, mata pencarian umumnya bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa, dan memiliki Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) lebih tinggi. Pada pemerintahan kabupaten memiliki luas wilayah yang luas, kepadatan penduduk dan PDRB yang rendah, dan mata pencarian umumnya sektor pertanian, perikanan dan atau bersifat agraris.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang terjadi dalam mengelola keuangan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur serta adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, sehingga tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pengaruh Opini Audit BPK, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2017-2019”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Apakah Opini Audit BPK, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan *Intergovernmental Revenue* berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2019?
2. Apakah Opini Audit BPK berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2019?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2019?
4. Apakah *Intergovernmental Revenue* berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2019?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini memiliki tujuan yang akan di capai, diantaranya:

1. Untuk mengetahui pengaruh Opini Audit BPK, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2019.

2. Untuk mengetahui pengaruh Opini Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2019.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi Penelitian Selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, sumber referensi dan perbandingan untuk peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian terkait dengan pengungkapan Opini Audit BPK, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan *Intergovernmental Revenue*.
 - b. Bagi Bidang Ilmu
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi dalam mengembangkan bidang ilmu akuntansi terutama yang berkaitan dengan Akuntansi Sektor Publik dan Manajemen Keuangan.

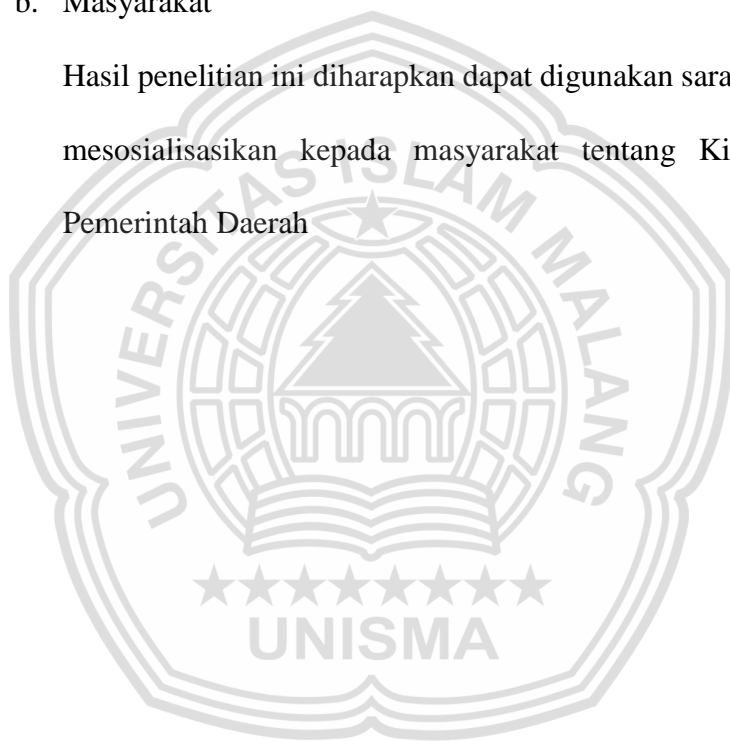
2. Secara Praktis

a. Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan pemerintah daerah sebagai pengambilan kebijakan serta dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang optimal.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sarana informasi dan mesosialisasikan kepada masyarakat tentang Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari variabel Opini Audit BPK, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2019. Setelah melaksanakan analisis data diperoleh suatu kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Opini Audit BPK, PAD dan *Intergovernmental Revenue* secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur 2017-2019. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,032 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Opini Audit BPK, PAD, dan *Intergovernmental Reveue* berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Opini Audit BPK secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2019. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai t sebesar -1,070 dan nilai signifikansi sebesar 0,288 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Opini Audit BPK tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

3. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2019. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai t sebesar -2,154 dan nilai signifikansi sebesar 0,034 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh signifikan negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
4. *Intergovernmental Revenue* secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2019. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai t sebesar -2,880 dan nilai signifikansi sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Intergovernmental Revenue* berpengaruh signifikan negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan diantaranya sebagai berikut:

1. Sampel penelitian ini hanya menggunakan pemerintah daerah Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur, sehingga belum mencakup secara keseluruhan pemerintah daerah yang ada.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada satu rasio keuangan pemerintah daerah yaitu rasio efisiensi, sehingga penelitian belum cukup menggambarkan secara keseluruhan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Penelitian ini hanya memakai 3 variabel independen diantaranya Opini Audit BPK, Pendapatan Asli Daerah dan *Intergovernmental Revenue*.

4. Periode penelitian ini hanya menggunakan waktu pengamatan selama 3 tahun. Sehingga kurang menggambarkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam jangka panjang.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, simpulan serta keterbatasan penelitian, maka terdapat saran yang disampaikan peneliti sebagai berikut:

1. Bagi peneliti berikutnya dapat menambah objek penelitian yang dipakai yaitu kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, sehingga dapat menggambarkan secara menyeluruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Timur. Selain itu peneliti berikutnya dapat menggunakan objek penelitian yaitu kabupaten di pulau Jawa.
2. Bagi peneliti berikutnya dapat menggunakan rasio penilaian kinerja keuangan yang lainnya pada variabel dependen. Rasio keuangan tersebut diantaranya rasio efektivitas, rasio keserasian belanja, dan rasio kemandirian.
3. Bagi peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel independen lainnya yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah diantaranya Ukuran Pemerintah, Ukuran Legislatif, Belanja Modal, Belanja Operasi, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Status Daerah dan Temuan Audit.



4. Bagi peneliti berikutnya dapat menambah rentang waktu pengamatan penelitian, sehingga dapat melihat Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam rentang waktu yang lebih Panjang.



Daftar Pustaka

- Abdurahman, Maman, dan Rahayu Kariadinata. 2015. *Dasar-Dasar Statistik Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Akhmad. 2019. *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Azkiya.
- Andaresta, Halen, Ermawati, dan Khairul Aswar. 2021. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Size Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *Korelasi* 2:1614–24.
- Andirfa, Mulia, Hasan Basri, dan M. Shabar. A. Majid. 2016. “Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh.” *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 5(3):30–38.
- Astuti, Tutut Dewi, Nuriyadi, Endang Sri Utami, dan M. Budiantara. 2017. *Dasar-Dasar Statistik Penelitian*. Yogyakarta: Sibuku Media.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*.
- Ditasari, Rollis Ayu, dan M. Agu. Sudrajat. 2020. “Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur.” *Inventory* 4(2):104–17.
- Fadhli, Muhammad, dan Rusydi Ananda. 2018. *Statistika Pendidikan Teori Dan Praktik Dalam Pendidikan*. Medan: Widya Puspita.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (VII)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harto, Puji, dan Endri Parwanto. 2017. “Pengaruh Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah” *Diponegoro Jurnal of Accounting* 6(1):2337–46.
- Hapsari, Dini Wahjoe, dan Endri Lestari. 2020. “Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2013-2018).” E-Proceeding of Management 7(2):2743–50.

Wibowo, Hardiyanto, dan Sri Mulyani. 2017. “*Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015).*” *Kompartemen* 15(1):57-66.

Indrawati, Novita, Yesi Mutia Basri, dan Taufik Dasmal. 2020. “*Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Intergovernmental Revenue, Temuan Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.*” *Jurnal Al Iqtishad* 2(16):39–57.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2015. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Majid, Jamaluddin. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Gowa: Pusaka Almaida.

Mappiasse, Annas L. 2018. “*Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan.*” *Bongaya Journal for Research in Accounting* 1(2):51–55.

Mardianis, Enggar Arum, D.P, dan H. Afrizal. 2017. “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Daerah Dan Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi.*” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan UNJA* 2(3):1–28.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi Offset.

Nihayah, Ana Zahrotun. 2019. *Pengolahan Data Penelitian Menggunakan Software SPSS 23.0*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rahayu, Sri, dan Rudythia Dwitama. 2020. “*Pengaruh Ukuran Pemerintah,*

Intergovernmental Revenue, Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018). E-Proceeding of Management 7(2):3251–61.

Setiadi. 2019. *Pemeriksaan Akuntansi (Teori Dan Praktek)*. Yogyakarta: Bening Pustaka.

Sisdyani, Eka Ardhani, dan Ni Made Suryaningsih. 2016. “*Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.*” E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 15(2):1453–81.

Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Kediri: Literasi Media.

Sugiyono. 2015. *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Sukardi, dan Akhila Santika Kirana. 2020. “*Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Indonesia Tahun 2018).*” Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Mutiara Madani 8(2):175–92.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

<https://jatim.bpk.go.id/dari-media/menteri-keuangan-sri-mulyani-apresiasi-pemprov-jatim-raih-wtp-lebih-dari-lima-kali/> (diakses pada 18 Oktober 2021)

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2017/10/20/22224081/kasus-korupsi-mantan-bupati-pamekasan-didakwa-pasal-berlapis/> (diakses pada 18 Oktober 2021)